

JAWA POS

RADAR MADIUN

RADAR MAGETAN

Selasa, 27 April 2021

--Bupati Menulis--



Oleh: Suprawoto
(Bupati Magetan)

Peradaban Bupati

BUPATI punya peran penting sejak dulu. Kedudukannya sebagai jembatan antara penguasa pusat dengan rakyat. Kata bupati berasal dari bahasa Sansekerta. Yakni, *bhu* yang berarti "bumi" atau "tanah" dan *pati* berarti "tuan", "pemilik", atau "penguasa". Bila diterjemahkan yakni pemilik atau penguasa bumi atau tanah. Arti

lainnya sebagai raja.

Raja membagikan tanahnya kepada pemimpin di bawahnya dan orang-orang dekatnya. Pembagian itu sebagai imbalan atas jasa-jasanya. Para pemimpin yang kemudian disebut bupati ini lantas membagikan lagi kepada tingkatan di bawahnya. Tentu tidak cuma-cuma, ada

ikatan tertentu.

Tidak dapat dimungkiri, bupati kemudian berkuasa seperti raja. Kehidupannya mirip namun dalam skala lebih kecil. Setiap bupati punya simbol kebesaran. Antara lain, songsong, pakaian kebesaran, senjata pusaka, kandaga, dan kuda tunggang. Bupati juga punya pengawal

khusus dan prajurit bersenjata. Atas dasar itu, dalam pandangan masyarakat, bupati memiliki otoritas penuh. Baik sebagai kepala daerah maupun pemimpin tradisional. Bupati juga berperan sebagai kepala institusi sosial, birokrasi, dan agama di dalam masyarakat Jawa. ▶ Baca Peradaban... Hal.23

Sambungan dari Hal.16

Pada masa Mataram, bupati berperan sebagai wakil penguasa dari kerajaan induknya. Di masa prakolonial, para bupati diberikan lungguh, penarikan pajak, dan sumber lainnya oleh raja. Hal tersebut sebagai sumber keuangan untuk gaya hidup dan kewajiban di kerajaan.

Lungguh adalah kedudukan yang didukung dan dibiayai oleh cacah atau keluarga petani. Dalam lingkup wilayah kekuasaan, keluarga petani menjadi sumber utamanya. Posisi keluarga petani sangat penting. Pasokan beras dan tanaman lain menjadi sumber pajak natura. Juga sumber daya kerja, baik bagi dirinya, raja, maupun kerajaan.

Pada era kolonial, bupati tetap ditempatkan pada posisi tertinggi. Baik dalam hierarki pemerintahan pribumi maupun struktur masyarakat tradisional. Penghargaan, gelar, promosi, dan pencopotan menjadi wewenang pemerintah kolonial.

Karenanya, tanpa bantuan bupati, pemerintah kolonial bakal kesulitan mendapatkan apa yang diharapkan dari politik eksploitasinya. Begitu pula rakyat karena ikatan feodal yang menggantungkan hidupnya pada kebijakan bupati.

Perombakan besar-besaran terjadi saat Daendels menjadi Gubernur Jenderal. Salah satunya, admi-

nistrasi pemerintahan. Bupati tidak lagi otonom, melainkan sebagai pegawai pemerintah. Sehingga mendapatkan gaji dan tunjangan bulanan. Namun, posisi sebagai kepala pemerintahan tertinggi di tingkat lokal dipertahankan.

Sumber keuangan dipenuhi pemerintah untuk memenuhi gaya hidup. Contohnya, gaji bupati Madiun f. 1.500; Magetan f. 800; Ponorogo f. 800; dan Somoroto f. 600. Kemudian, Ngawi f. 600; Purwodadi f. 600; dan Pacitan f. 500.

Selain mencukupi gaya hidup bupati, gaji itu juga untuk kecukupan keluarga besar. Terdiri istri, selir, dan anak-anak. Itu belum pegawai pembantu yang jumlahnya mencapai puluhan orang.

Semakin besarnya anggaran pemerintah kolonial untuk belanja bupati, lalu dilakukan reformasi birokrasi. Khususnya penyederhanaan organisasi. Jumlah kabupaten dikurangi. Karesidenan Madiun dulu meliputi Kabupaten Madiun, Magetan, Ponorogo, Somoroto, Ngawi, Purwodadi, dan Pacitan. Dalam penyederhanaan, Somoroto dan Purwodadi dihapus.

Kala Indonesia merdeka, kabupaten/kota tetap dipandang penting. Itu wajar karena titik berat otonomi di setiap perubahan undang-undang pemerintahan daerah selalu ditempatkan pada kabupaten/kota. Demikian halnya pada era reformasi.

Bupati masih tetap menempati rumah peninggalan zaman dulu. Bangunan yang besar menunjukkan status peradaban priyayi. Ada pendapa di depan alun-alun. Hanya, tidak perlu lagi pergi dengan payung songsong, tumbak, pakecohan, dan lain-lain. Meski begitu, ungkapan seperti ndoro kanjeng masih tetap ada dan sering didengar.

Yang paling membedakan hanya pada pengangkatannya. Sebagai raja kecil, sistemnya didasarkan keturunan. Namun, saat era kemerdekaan berdasarkan demokrasi. Rakyat yang memilih, dengan pasang-surut situasinya.

Seperti kondisi saat ini, biaya yang dikeluarkan sangat besar. Tentu menyulitkan bila ongkos politik, sosial, dan kultural yang melekat pada bupati tidak diikuti oleh sumber keuangan. Bayangkan, gaji bupati tidak lebih besar dari gaji dan tunjangan sarjana berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja beberapa tahun.

Korbannya sudah banyak. Teranyar ada bupati Bandung Barat, wali kota Tanjung Balai, dan gubernur Sulawesi Selatan. Nama yang disebutkan terakhir itu sangat terpelajar. Mantan bupati Bantaeng itu meraih banyak penghargaan. Salah satunya, Bung Hatta Anti Corruption Award 2017. Apa kita membiarkan sebuah sistem yang salah? Apa tidak segera diperbaiki? Wallahu a'lam. (* / cor)